



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# LAPORAN

## PENGELOLAAN RISIKO BERKALA BAGIAN PEREKONOMIAN

TRIBUNAN I TAHUN 2026



Lamongan  
Megilan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: [bageko@lamongankab.go.id](mailto:bageko@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Nomor : 005 / 10 / 413.021/2026

Lamongan, 17 Maret 2026

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2026 Bagian  
Perekonomian Setda  
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2026 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

**NURUL MUKMININ, SE, MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19741101 199402 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :



Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: [bageko@lamongankab.go.id](mailto:bageko@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	005 / 110 / 413.021 / 2026
TANGGAL TERBIT	:	17 Maret 2026

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Perekonomian  <b>ISNAINI RAHMAWATI, SP.</b> Penata Muda Tingkat . I NIP. 19950207 201903 2 012
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  <b>ARIP ROHMAN SOLEH. SP</b> Penata Tingkat I NIP. 19850405 201001 1 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  <b>NURUL MUKMININ, SE, MM.</b> Pembina Tingkat I NIP. 19731208 200312 2 004

**Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Bagian Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Bagian Perekonomian mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perekonomian Setda mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perekonomian demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perekonomian, selain itu Bagian Perekonomian juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perekonomian Setda.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perekonomian Setda.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian:						
1	Memaksimalkan survei oleh pihak ketiga dan merapatkan seluruh bagian di Setda terkait hasil perhitungan Nilai IKM Setda	Evaluasi hasil form survei Kepuasan Masyarakat	Sekretaris Daerah	Januari-Desember 2026	-	Nilai IKM keluar diakhir tahun
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomian:						
1	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT yang tidak terdampak oleh PMK yang baru	Komunikasi melalui Grup Whatsapp DBHCHT Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur	Kepala Bagian Perekonomian	Januari-Desember 2026	Februari 2026	masih menunggu update PMK terbaru

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran, form 10 dari simario)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tangga 1 terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian										
1	Belum maksimal peran Bagian yang ada di setda dalam penyusunan IKM Setda	RSO 26.33 .04.0 2.7	Des 2025	1. Partisipasi responden yang mengisi survei IKM masih rendah 2. Kontrol Setda terhadap hasil survei masih belum maksimal	IKM Setda terukur dengan keakuratan yang tidak bisa dipastikan secara langsung oleh seluruh Bagian di Setda	Nilai Resiko 0%	Memaksimalkan survei oleh pihak ketiga dan merapatkan seluruh bagian di Setda terkait hasil perhitungan Nilai IKM Setda	Januari - Desember	-	-
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian:										
1	kegiatan DBHCHT di Kabupaten Lamongan masih terhambat pelaksanaannya	ROO 26.33. 04.02. 7	Januari -Maret 2026	masih terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang belum disahkan	1. perubahan PMK No. 72 Tahun 2024 menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan proses penyerapan anggaran 2. Penyusunan Peraturan Bupati terkait Pedoman Pelaksanaan DBHCHT masih harus menunggu dasar hukum PMK yang baru	Nilai Resiko 0%	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT yang tidak terdampak oleh PMK yang baru	Januari - Desember	Feb 2026	-

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Perekonomian sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi terkait perubahan kebijakan.
- b. Hambatan yang menyebabkan pengajuan pencairan kegiatan ditolak oleh BPKAD dikarenakan dokumen pengajuan Bagian pada saat Ketika dilaksanakan pengajuan, data/dokumen pendukung kurang lengkap, hal itu disebabkan karena Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang jeli dan teliti dalam melengkapi dokumen pendukung pengajuan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pematkhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Perekonomian dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.